

United Nations

E/C.19/2013/12



Economic and Social Council

Distr.: General
20 February 2013

Original: English

Sidang Forum Permanen PBB untuk Masyarakat Pribumi

Sidang Ke-12

New York, 20-31 May 2013

Agenda provisional Item 8

Program Kerja Ke Depan dari Forum Permanen, termasuk issue Ekonomi dan Dewan Sosial dan Issue darurat

Studi Penjajahan di Wilayah Pasifik

Catatan oleh Sekretariat

Berdasarkan keputusan dari Forum Permanen untuk Penduduk Asli di sidang kesebelas (lihat E/2012/43, para. 110), Valmaine Toki, anggota Forum, melakukan studi tentang dekolonisasi wilayah Pasifik, yang dengan ini disampaikan kepada Forum pada sesi kedua belas.

* E/C.19/2013/1.

13-23849 (E) 070313


Please recycle 



STUDI DEKOLONISASI WILAYAH PASIFIK¹

PENGANTAR

1. Dalam pengakuan dari efek negatif bahwa kolonisasi dan doktrin penemuan memiliki terhadap Penduduk Asli dan komunitas mereka, Forum Permanen untuk Penduduk Asli menyelenggarakan diskusi panel selama sesi kesebelas berjudul "Doktrin Discovery: dampak abadi pada Penduduk Asli dan hak ganti rugi atas penaklukan terakhir (pasal 28 dan 37 dari Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli)". Telah ada diskusi yang luas dari doktrin, perkembangan sejarah dan dampak masa lalu dan sekarang, di samping cara-cara yang telah terpengaruh dan terus mempengaruhi Penduduk Asli dan hubungan antara pemerintah dan Penduduk Asli. Ini adalah tanpa pertanyaan bahwa doktrin telah memiliki efek yang merugikan pada semua Penduduk Asli. Pelaksanaannya digunakan sebagai instrumen untuk mengasingkan Penduduk Asli dari tanah mereka, sumber daya dan budaya, sebuah proses yang berlanjut hari ini dalam berbagai bentuk.
2. Pada sidang kesebelas, Forum Permanen mengingat preambule keempat paragraf dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli, yang menegaskan bahwa semua doktrin, kebijakan dan praktek berdasarkan atau advokasi superioritas masyarakat atau individu atas dasar asal-usul kebangsaan atau ras, agama, perbedaan etnis atau budaya yang rasis, secara ilmiah salah, secara hukum tidak sah, secara moral terkutuk, dan secara sosial tidak adil. Pembeneran hukum dan politik untuk perampasan Penduduk Asli dari tanah mereka, pencabutan hak mereka dan pencabutan hak-hak mereka seperti doktrin penemuan, doktrin dominasi, "penaklukan", "penemuan", terra nullius atau ajaran yang Regalian diadopsi oleh penjajah di seluruh dunia. Sementara doktrin-doktrin jahat yang dipromosikan sebagai otoritas untuk akuisisi tanah dan wilayah Penduduk Asli, ada asumsi yang lebih luas tersirat dalam doktrin, yang menjadi dasar untuk penegakan kewenangan dan kontrol atas kehidupan Penduduk Asli dan tanah, wilayah dan sumber daya. Penduduk Asli dibangun sebagai "biadab", "barbar", "mundur" dan "inferior dan beradab" oleh penjajah, yang menggunakan konstruksi seperti untuk menundukkan, mendominasi dan mengeksploitasi Penduduk Asli dan tanah, wilayah dan sumber daya (lihat E/2012/43, alinea. 4).
3. Mengingat efek merugikan dari kolonisasi dan doktrin penemuan pada Penduduk Asli, bersama dengan panggilan oleh Forum Permanen untuk Negara untuk menolak doktrin seperti dasar untuk menyangkal hak asasi manusia masyarakat ndigenous, penelitian ini memberikan studi kasus yang menyoroti dorongan untuk hak penentuan nasib sendiri dan dekolonisasi di kalangan Penduduk Asli dari Pasifik. Ini akan melacak hubungan inti antara doktrin penemuan dan proses kolonisasi dikoordinasikan oleh negara, gereja dan perusahaan perdagangan. Hal ini juga akan menggambarkan inisiatif Penduduk Asli untuk mengkoordinasikan kampanye dekolonisasi berakar pada hukum hak asasi manusia internasional.

KOMISI KHUSUS DEKOLONISASI

4. Dalam upaya untuk mempercepat kemajuan dekolonisasi, Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara kolonial dan Masyarakat diadopsi oleh Majelis Umum dalam resolusi 1514 (XV) pada tanggal 14 Desember 1960. Dalam pasal 1 Deklarasi, diakui bahwa tidak ada orang harus tunduk kepada dominasi dan eksploitasi dan, dalam pasal 2, bahwa semua

¹ The author wishes to thank Joshua Cooper for his contribution to the present study.

bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan berdasarkan benar bahwa mereka bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Pasal 5 Deklarasi menyatakan bahwa:.....

Langkah segera harus diambil, dalam Wilayah Kepercayaan dan Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan, untuk mentransfer semua kekuatan untuk masyarakat wilayah-wilayah, tanpa syarat apapun atau pemesanan, sesuai dengan keinginan mereka dinyatakan bebas dan keinginan, tanpa setiap pembedaan ras, keyakinan atau warna, untuk memungkinkan mereka untuk menikmati menyelesaikan kemerdekaan dan kebebasan.

5. Pada tahun 1961, Panitia Khusus Situasi berkaitan dengan Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara kolonial dan Masyarakat diciptakan oleh Majelis Umum dengan tujuan memantau pelaksanaan Deklarasi. Komite adalah badan PBB secara eksklusif ditujukan untuk masalah dekolonisasi dan setiap tahun meninjau daftar Non-Pemerintahan Sendiri Wilayah yang Deklarasi berlaku dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaannya.
6. Daftar Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri awalnya disiapkan pada tahun 1946 (lihat Bab XI dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan satu set kriteria untuk menentukan apakah suatu wilayah bisa dianggap non-pemerintahan sendiri dan ditempatkan pada daftar didirikan oleh Majelis Umum dalam resolusi 1541 (XV) tahun 1960. 12 Kriteria termasuk apakah suatu wilayah yang dikenal dari jenis kolonial dan apakah itu secara geografis terpisah dan berbeda etnis dan / atau budaya dari administrasi negara itu. Elemen tambahan seperti apakah wilayah administrasi dilakukan, fungsi politik sendiri, hukum, ekonomi atau sejarah juga dipertimbangkan.
7. Setelah didirikan bahwa hubungan antara Negara dan wilayah adalah salah satu kelemahan atau ditempatkan wilayah dalam posisi subordinasi kepada Negara, kriteria daftar dipenuhi. Kriteria selanjutnya mengidentifikasi tiga posisi diri pemerintahan: Munculnya sebagai Negara berdaulat yang independen; asosiasi bebas dengan negara merdeka, atau integrasi dengan negara merdeka.
8. Daftar ini telah diperbarui oleh Majelis Umum melalui rekomendasi Komisi Khusus Dekolonisasi (Team Pansus Komisi Dekolonisasi). Dalam beberapa kasus, Negara yang diberikan Wilayah tergantung dihapus dari daftar sepihak atau dengan suara Majelis.
9. Pada tahun 1988, dalam resolusi 43/46, Majelis Umum dianggap PBB berkewajiban untuk terus berperan aktif dalam proses penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta untuk mengintensifkan upayanya untuk seluas-luasnya penyebaran informasi tentang dekolonisasi, dengan maksud untuk mobilisasi lebih lanjut dari pandangan umum internasional dalam mendukung lengkap informasi dekolonisasi. Dalam resolusi 43/47, Majelis menyatakan periode 1990-2000 Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme. Pada tahun 1991, dalam resolusi 46/181, itu menyatakan bahwa tujuan akhir dari Dekade Internasional adalah latihan bebas dari hak penentuan nasib sendiri dari setiap Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri yang tersisa. Sebuah rencana aksi tertentu diadopsi untuk memajukan realisasi tujuan tersebut.
10. Pada tahun 2000, mengingat dukungan dari deklarasi usulan baru dekade untuk pemberantasan kolonialisme oleh peserta dalam seminar regional Pasifik diselenggarakan oleh Komite Khusus untuk meninjau kondisi politik, ekonomi dan sosial di pulau kecil Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri, PBB melanjutkan, dalam resolusi 55/146, untuk menyatakan periode 2001-2010 Dekade Internasional Kedua Pemberantasan Kolonialisme.
11. Pada tahun 2010, mengingat bahwa peserta dalam seminar regional Pasifik diselenggarakan di Nouméa from 18-20 Mei 2010 sudah menyerukan Panitia Khusus untuk mengusulkan deklarasi

dekade baru untuk pemberantasan kolonialisme, dan mengingat resolusi 64/106, di mana ia telah menegaskan kembali kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan kolonialisme pada tahun 2010, Majelis Umum, dalam resolusi 65/119, menyatakan periode 2011-2020 Dekade Internasional Ketiga Pemberantasan Kolonialisme.

12. Pada 2012, Ketua Pansus, Diego Morejon-Pazmino (Ekuador), mencatat:

Ketiga Dekade Internasional tidak bisa menjadi "dekade yang hilang untuk dekolonisasi ". Menghantui momok kolonialisme perlu dihadapi. Komite harus mencari cara untuk memajukan proses dengan memperhatikan memperhatikan realitas saat ini dan prospek. Ketiga Dekade Internasional bertanya dari masyarakat internasional tidak kurang dari dukungan teguh kepada Non-Pemerintahan Sendiri Wilayah dalam membangun kondisi yang layak diri pemerintah di tanah, atas dasar kasus per kasus. Wilayah harus diberdayakan untuk melaksanakan kehendak mereka pada status politik mereka masing-masing melalui diakui tindakan penentuan nasib sendiri secara internasional, akhirnya mengarah ke mereka delisting oleh Majelis Umum.²
13. Filsafat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran penemuan berada di akar pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan, khususnya, hak untuk menentukan nasib sendiri dari Penduduk Asli dalam abad kedua puluh satu. Dalam Dekade Internasional Ketiga, pemeriksaan melalui narasi dari Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli dapat memberikan arah masa depan bagi Penduduk Asli mengejar kebebasan dasar bahwa mereka secara historis telah ditolak. Ini akan menjadi penting bagi Pansus untuk berinteraksi dengan badan-badan PBB khususnya berkaitan dengan Penduduk Asli. Komite bisa berinteraksi dengan Forum Permanen di sesi tahunan dan mengusulkan lokakarya ahli di masa depan. Komite juga dapat berkontribusi untuk studi mungkin.
14. Dari 16 Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri saat ini terdaftar untuk aktif dipertimbangkan oleh Komite, 4 (Samoa Amerika, Guam, Kaledonia Baru dan Tokelau) yang terletak di Pasifik. Pasifik pulau tidak ada dalam daftar tapi mencari pertimbangan termasuk Perancis Polinesia dan Hawaii. Ada juga gerakan kemerdekaan di Papua Barat, sebuah provinsi di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa sebelumnya Hawaii ditampilkan di daftar namun dilepas setelah referendum tahun 1959. Mengingat bahwa kriteria PBB untuk dihapus dari daftar itu tidak sepenuhnya terpenuhi, namun, Kanaka Maoli, atau Hawaii asli, kontes yang penghapusan.

ARTIKEL YANG RELEVAN DARI DEKLARASI PBB TENTANG HAK-HAK PENDUDUK ASLI

15. Pasal 3 dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli menyatakan bahwa Penduduk Asli memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan, dengan hak itu, mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar mereka ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 4 mengatur bahwa, dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, Penduduk Asli memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal dan lokal mereka.
16. Pasal 4, didorong oleh pasal 3, memberikan alasan yang jelas untuk aplikasi ke Pansus dekolonisasi. Selain itu, artikel lain yang menyediakan hak kontekstual dekolonisasi termasuk pasal 11, tentang hak Penduduk Asli untuk berlatih dan merevitalisasi tradisi budaya dan adat, termasuk hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan manifestasi masa lalu,

² See www.un.org/News/Press/docs/2012/gacol3244.doc.htm.

sekarang dan masa depan budaya mereka. Pasal 12 menegaskan hak Penduduk Asli untuk mewujudkan, berlatih, mengembangkan dan mengajarkan tradisi spiritual dan agama, adat dan upacara. Pasal 14 mengartikulasikan hak Penduduk Asli untuk menentukan dan mengatur sistem pendidikan mereka dan institusi yang menyediakan pendidikan dalam mereka sendiri bahasa. Pasal 20 menegaskan bahwa Penduduk Asli memiliki hak untuk menjaga dan mengembangkan sistem politik, ekonomi dan sosial mereka atau lembaga.

17. Yang penting, pasal 26 menegaskan bahwa Penduduk Asli memiliki hak untuk tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional, diduduki atau digunakan atau diperoleh dan, selanjutnya, bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki dengan alasan kepemilikan tradisional atau lainnya pendudukan tradisional atau penggunaan, serta mereka yang telah mereka peroleh.
18. Pasal 4, didorong oleh pasal 3 dan dengan dukungan kontekstual tambahan artikel 11, 12, 14, 20 dan 26, memberikan alasan yang jelas untuk dekolonisasi. Pansus bisa memeriksa latihan potensi keterlibatan dengan Penduduk Asli untuk mewujudkan hak yang tercantum dalam artikel-artikel berdasarkan kasus per kasus atau menghibur konferensi atau seminar di wilayah Pasifik.

SNAPSHOT SINGKAT PASIFIK

19. The Pacific adalah daerah bervariasi dan kaya.³ Ketika sebagian besar negara mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli pada tahun 2007, Australia dan Selandia Baru adalah dua dari Amerika dissenting empat. Di antara 11 abstain keseluruhan adalah negara Pasifik, Samoa. Posisi tersebut sekarang telah berubah dan Australia, Selandia Baru dan Samoa memiliki semua menyatakan dukungan mereka terhadap Deklarasi. Di antara 34 Negara non-voting adalah 10 negara Pasifik: Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Karena terjadinya meresap dan luas kolonisasi dialami seluruh Pasifik, ini tingkat yang relatif tinggi non-adopsi Deklarasi ini bisa dibidang mencerminkan posisi kolonialis lazim. Negara-negara Pasifik terus tetap terikat Powers daerah melalui bantuan dan karenanya melanjutkan perspektif kolonialis oleh proxy.
20. Selama 1800-an, sebagian besar negara-negara kepulauan Pasifik telah mengalami berbagai Eropa komersial, agama dan kepentingan lainnya. Negara Eropa berdesakan satu sama lain dan Penduduk Asli atas keuntungan dari mana mereka berharap mendapat keuntungan, termasuk eksploitasi berkelanjutan sumber daya alam.⁴ Pada 1800-an, para Powers asing telah mendapatkan kekuasaan yang berdaulat atas hampir semua negara-negara kepulauan Pasifik, dengan beberapa negara pulau terkunci ke dalam salah satu sumber utama eksploitasi sumber daya di bawah pemerintahan kolonial. Negara pulau Pasifik yang terus menerus dilihat melalui

³ In the present report, the term "Pacific" should be understood to include the 16 States members of the Pacific Islands Forum (Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Zealand (including Tokelau), Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu), the three French territories (French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna) the United States territories (American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands), Timor-Leste and the Province of West Papua, Indonesia.

⁴ Ron Crocombe, *Asia in the Pacific Islands: Replacing the West* (Suva, IPS Publications, 2007), p. 211.

lensa yang sama yang digunakan oleh para perancang doktrin penemuan, dengan demikian membenarkan penaklukan Penduduk Asli dan penyitaan sumber daya alam pulau-pulau'. Pendekatan-pendekatan yang berakar pada kegiatan negara-negara kolonial, gereja atau perusahaan karena perspektif yang manusiawi penduduk pulau pribumi. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan selama abad itu adalah kompetisi antara negara-negara untuk merebut Pacific States pulau untuk kepentingan politik, militer dan keuangan. Masalah yang telah berlama-lama sampai hari saat ini.

PENJAJAHAN DI PASIFIK

21. Setelah lebih dari satu abad kekuasaan kolonial, jejak kiri pada politik, budaya dan ekonomi di Pasifik telah mengakibatkan campuran gelisah adat dan sistem kolonial pemerintahan dan administrasi. Sistem kolonial pemerintah, pendidikan dan agama telah meresap dan mendominasi sistem adat, dengan banyak bahasa pribumi diturunkan ke ambang kepunahan.
22. Berbeda dengan daerah lain, kecenderungan dekolonisasi di Pasifik tidak mengikuti preseden yang ditetapkan oleh Asia, Afrika dan Karibia. Timing, ukuran, keterpencilan dan kerentanan ekonomi, bersama dengan faktor termasuk penentuan beberapa kekuatan kolonial tetap, terlepas dari keinginan Penduduk Asli, memberikan latar belakang yang unik untuk kemandirian dan dekolonisasi Pasifik.⁵ Wilayah ini menawarkan pelajaran penting yang harus dipelajari jika aspirasi resolusi PBB tentang dekolonisasi yang harus dipenuhi. Banyak Powers kekaisaran berpartisipasi di Pasifik selama berabad-abad, membagi budaya Melanesia, Mikronesia dan Polinesia sesuai dengan aspirasi akuisisi dan asimilasi. Pansus dan Forum Permanen bisa studi co-sponsor dan lokakarya ahli yang dapat berguna dalam Dekade Internasional Ketiga Pemberantasan Kolonialisme. Upaya kolaboratif tersebut dapat menawarkan penelitian yang relevan bagi mereka yang mencari solusi di wilayah tersebut.
23. Menyusul konflik antara negara-negara kekaisaran, transfer kekuasaan kolonial di Pasifik adalah hal biasa. Pada akhir Perang Dunia Kedua, semua negara-negara Pasifik, dengan pengecualian Tonga, telah dijajah dan dicaplok oleh kekuatan kolonial yang termasuk Australia, Perancis, Jerman, Selandia Baru, Spanyol dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Beberapa negara Pasifik, seperti Palau, mengalami beberapa penjajah, yang diperintah oleh Spanyol, Jerman, Jepang dan, belakangan, Amerika Serikat.
24. Belanda ditahan West New Guinea, Chili diadakan Pulau Paskah (juga Rapa Nui dikenal sebagai), dan Inggris diadakan Pitcairn, Gilbert dan Ellice Islands, Fiji, Kepulauan Solomon dan penguasa atasan informal Tonga. Perancis mengklaim Kaledonia Baru, Polinesia Perancis dan Wallis dan Futuna. Britania Raya, Australia dan Selandia Baru dikelola bersama Nauru.⁶ wilayah Amerika Serikat termasuk Hawaii pulau, Samoa Amerika dan Guam. Bekas koloni Jepang dari Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Marshall dan Kepulauan Caroline diberikan sebagai Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik. Selandia Baru diadakan Samoa Barat, Kepulauan Cook (juga dikenal sebagai Rarotonga), Niue dan Tokelau.

⁵ B. MacDonald, "Decolonization and beyond: the framework for post-colonial relationships in Oceania", *Journal of Pacific History*, vol. 21, No. 3-4 (1986), p. 115.

⁶ Robert Aldrich, "The decolonization of the Pacific islands", *Itinerario*, vol. 24, No. 3-4 (November 2000), pp. 173-191.

25. Hari ini, Powers asing masih dalam kepemilikan wilayah di Pasifik meliputi Prancis, yang mempertahankan kontrol atas Wallis dan Futuna, Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis, dan Amerika Serikat, yang mempertahankan kontrol atas Guam, Hawaii dan Samoa Amerika. Guam dan Samoa Amerika tetap pada daftar bukan dirinya-Pemerintahan Wilayah (dari mana Hawaii sepihak dihapus pada saat kenegaraan pada tahun 1959). Chili mempertahankan kontrol atas Pulau Paskah (Rapa Nui) dan Selandia Baru selama Tokelau....
26. Salah satu alasan untuk melakukan penelitian ke dalam dan serius mengejar klaim dekolonisasi adalah pengingkaran abadi hak asasi manusia diabadikan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli. Misalnya, artikel 10 dan 30 keduanya dilanggar atas nama situasi keamanan global saat ini. Guam mengalami pembangunan militer yang dapat menghancurkan tatanan budaya masyarakat Chamorro adat dan Hawaii memiliki situs suci yang berfungsi sebagai fasilitas pelatihan militer hidup. Penduduk Pulau Paskah (Rapa Nui) sering disebut sebagai teroris karena secara damai menuntut bahwa hak asasi manusia mereka dihormati.

PROSES DEKOLONISASI: STUDI KASUS

27. Telah diusulkan bahwa ada tiga model dekolonisasi: pertama, mereka negara yang merdeka oleh tekanan internal Kekuatan mereka kolonial (Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Samoa dan Vanuatu), kedua, negara-negara yang telah memiliki kemerdekaan dipaksakan pada mereka oleh Kekuatan kolonial (Fiji, Kiribati, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Tuvalu), dan, ketiga, negara-negara yang telah merdeka tetapi mempertahankan hubungan diplomatik melanjutkan dengan Power kolonial (Kepulauan Cook (Rarotonga) dan Niue).⁷ Terlepas dari model, hasil akhirnya adalah realisasi dari hak Penduduk Asli untuk menentukan nasib sendiri. Sebuah seminar atau belajar bisa menjadi penting dalam menawarkan pemahaman yang berharga tentang model ini.
28. Pada tahun 1962, langkah pertama dekolonisasi modern di Pasifik dimulai ketika Selandia Baru mengundurkan diri dari Samoa Barat. Selandia Baru menarik diri dari Kepulauan Cook (Rarotonga) pada tahun 1965 dan Niue pada tahun 1974, dengan baik sekarang Serikat berpemerintahan sendiri dalam asosiasi bebas dengan Selandia Baru. Hubungan ini memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab penuh atas urusan internal mereka, sementara Selandia Baru, dalam konsultasi, mempertahankan tanggung jawab untuk urusan eksternal dan pertahanan.
29. Pada tahun 1968, Australia, Selandia Baru dan Inggris menarik diri dari Nauru. Meningkatnya ketidakpuasan di kalangan Nauruans dipicu oleh ketidakpuasan dengan menerima upah yang tidak memadai dari Australia untuk pertambangan fosfat.⁸ Australia dan Inggris menarik diri dari Papua Nugini pada tahun 1975. Kerajaan Inggris menarik diri dari Fiji pada tahun 1970, Kepulauan Solomon dan Tuvalu pada tahun 1978, Kiribati pada tahun 1979 dan Vanuatu, dengan Perancis, pada tahun 1980.
30. Karena keragaman wilayah Pasifik, penelitian ini terbatas pada studi kasus di bawah ini, meninjau langkah-langkah yang diambil oleh Kaledonia Baru, sebagai contoh dari Wilayah Non-

⁷ Max Quanchi, "End of an epoch: towards decolonization and independence in the Pacific", *Agora*, vol. 43, No. 4, p. 21.

⁸ *Ibid.*, p. 20.

Pemerintahan Sendiri saat ini pada daftar untuk dipertimbangkan oleh Pansus, dalam pencariannya untuk kemerdekaan, di samping status Hawaii, Polinesia dan Papua Barat.

NEW CALEDONIA

31. Prancis saat ini memegang kendali dari tiga wilayah di Pasifik: Wallis dan Futuna, Kaledonia Baru dan Polinesia (situs dari 193 uji coba nuklir di Moruroa dan Fangataufa antara tahun 1966 dan 1996). Sedangkan 1998 Nouméa Accord di Kaledonia Baru dan 1999 Statuta Otonomi di Polinesia Perancis telah melihat pergeseran kekuasaan dari Paris ke Pasifik, Prancis mempertahankan kedaulatannya atas kepulauan Pasifik dan telah menunda referendum tentang penentuan nasib sendiri di Kaledonia Baru.
32. Kaledonia Baru dianeksasi ke Perancis pada tahun 1853 dan menjadi luar negeri wilayah pada tahun 1956. Pada tahun 1946, PBB ditempatkan pada daftar Diri Pemerintahan Wilayah Bebas. Menurut sensus yang dilakukan pada tahun 2009, Kanaks, penduduk asli Kaledonia Baru, merupakan 40,3 persen dari total penduduk. Mereka telah secara konsisten mengejar kemerdekaan dari pemerintahan Perancis.
33. Dua perjanjian ditandatangani oleh Kanaks dengan Pemerintah Perancis untuk mencapai kemerdekaan. Yang pertama, Persetujuan Matignon, ditandatangani pada 6 November 1988, mencapai dukungan 80 persen dari populasi Perancis dan disediakan untuk referendum kemerdekaan yang akan diadakan sebelum 1998. Kedua, Accord Nouméa, telah ditandatangani antara Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste dan Pemerintah Perancis pada tanggal 5 Mei 1998. Ini disediakan untuk tingkat otonomi untuk Kaledonia Baru yang akan terjadi selama masa transisi hingga 20 tahun. Perubahan progresif yang diharapkan dari kesepakatan tersebut dalam kontrol politik lokal dan struktur, dengan Kanaks diberikan partisipasi yang lebih besar dalam urusan internal dan regional dan Perancis mempertahankan hak berdaulat, termasuk kontrol atas urusan militer dan luar negeri. Pengaturan ini mirip dengan yang antara Selandia Baru dan Niue dan Kepulauan Cook (Rarotonga). Intrinsik untuk proses ini
34. Pada persidangan ke enam puluh tujuh, Majelis Umum mengadopsi resolusi 67/130, di mana ia mengundang semua pihak yang terlibat untuk terus mempromosikan kerangka kerja untuk kemajuan damai Wilayah menuju tindakan penentuan nasib sendiri di mana semua opsi yang terbuka dan yang akan melindungi hak-hak dari semua sektor dari populasi, menurut surat itu dan semangat Accord Nouméa, yang didasarkan pada prinsip bahwa itu untuk populasi Kaledonia Baru untuk memilih bagaimana mengontrol nasib mereka. Majelis mencatat bahwa komite pengarah pada masa depan kelembagaan Kaledonia Baru telah didirikan dan diberi mandat untuk mempersiapkan masalah dasar yang harus diputuskan oleh referendum, yaitu transfer kekuasaan berdaulat, akses ke status internasional penuh dan organisasi kewarganegaraan menjadi kebangsaan. Dalam hal itu, pihaknya menyambut baik lima kesepakatan yang ditandatangani pada bulan Oktober 2011 oleh otoritas Perancis dan Pemerintah Kaledonia Baru untuk mengatur transfer pendidikan menengah, dengan efek pada 1 Januari 2012.
35. Ini mengingat ketentuan yang relevan dari Accord Nouméa bertujuan mengambil lebih luas memperhitungkan identitas Kanak dalam organisasi politik dan sosial dari Kaledonia Baru. Ini mencatat bahwa lagu baru digunakan bersama dengan lagu Perancis dan bahwa, pada tahun 2010, komite tindak lanjut telah merekomendasikan bahwa bendera Prancis dan bendera Kanak

harus erbang bersama di Kaledonia Baru. Hal ini juga mencatat kekhawatiran diungkapkan oleh sekelompok Penduduk Asli di Kaledonia Baru mengenai Rendahnya representasi mereka di struktur pemerintahan dan sosial Wilayah dan oleh perwakilan dari Penduduk Asli mengenai arus migrasi terus-menerus dan dampak penambangan terhadap lingkungan.

36. Majelis Umum menyambut sikap kooperatif dari negara lain dan Wilayah di wilayah menuju Kaledonia Baru, ekonomi dan politik aspirasi dan partisipasi meningkat dalam urusan regional dan internasional. Itu Majelis memutuskan untuk tetap bawah terus-menerus proses berlangsung di Kaledonia Baru sebagai hasil dari penandatanganan Accord Nouméa.
37. Pada tahun 2010, Ketua Pansus, Donatus St Aimee, mencatat bahwa, jika wilayah kecil memutuskan bahwa itu adalah kepentingan mereka untuk mempertahankan hubungan dengan penjajah mereka, keputusan itu harus dihormati. Dia juga mencatat, bagaimanapun, ukuran yang sering tidak menghalangi kelompok-kelompok kecil atau wilayah dari usaha mencari kemerdekaan. Dia mengatakan bahwa itu bukan hanya masalah kemerdekaan, tetapi dari apa jenis hubungan yang diinginkan dengan Power administrasi dalam hal pemeliharaan dan pelestarian budaya Penduduk Asli.⁹
38. Untuk Penduduk Asli Kaledonia Baru, telah menjadi jalan panjang dan sulit untuk menentukan nasib sendiri. Kesulitan Meskipun demikian, proses untuk realisasi hak dasar penentuan nasib sendiri adalah tegas di trek. Ini akan jujur jika Pansus adalah untuk menahan dukungannya. Penduduk Asli juga mengejar pendekatan cara-cara damai dalam menghadapi pembalasan kekerasan untuk menciptakan solusi yang menghormati aturan hukum. Bahwa pendekatan damai dikejar penting untuk memasukkan dalam tinjauan masa depan dekolonisasi di Untuk Penduduk Asli Kaledonia Baru, telah menjadi jalan panjang dan sulit untuk menentukan nasib sendiri. Kesulitan Meskipun demikian, proses untuk realisasi hak dasar penentuan nasib sendiri adalah tegas di trek. Ini akan jujur jika Pansus adalah untuk menahan dukungannya. Penduduk Asli juga mengejar pendekatan cara-cara damai dalam menghadapi pembalasan kekerasan untuk menciptakan solusi yang menghormati aturan hukum. Bahwa pendekatan damai dikejar penting untuk memasukkan dalam tinjauan masa depan dekolonisasi di Pasifik, mengingat bahwa banyak pasukan Kanak kebebasan dasar terus menghadapi pembalasan sebagai akibat dari klaim berdasarkan doktrin penemuan. Itu hanya ketika para pemimpin politik mereka seperti Jean-Marie Tjibaou memegang posisi penting di gereja bahwa posisi itu akhirnya berubah.

PERANCIS POLYNESIA

39. Polinesia Perancis (juga dikenal sebagai Te Ao Maohi) terdiri dari lima rantai yang berbeda pulau, Kepulauan Society (dibagi menjadi Kepulauan Windward dan Leeward Islands), Kepulauan Marquesas, Kepulauan Tuamotu, Kepulauan Austral dan Kepulauan Gambier, membentang sepanjang 1 juta mil persegi lautan. Sebagian besar penduduk tinggal di Kepulauan Windward, rantai yang mengandung dua yang paling dihuni pulau, Tahiti dan Moorea.¹⁰ Penduduk Asli

⁹ Radio New Zealand, "UN decolonisation talks to open in New Caledonia", 16 May 2010. Available from www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=53568.

¹⁰ Casey Recupero, "Tentative steps in Tahiti", *Cultural Survival Quarterly*, vol. 24, No. 1 (2000). Available from www.culturalsurvival.org/ourpublications/cs/article/tentative-steps-tahiti.

- adalah kelompok mayoritas di Polinesia Prancis, terdiri dari 66 persen dari populasi. Eropa (sebagian besar Perancis) account untuk 12 persen dan kelompok etnis lainnya 22 persen.¹¹
40. Pada tahun 1842, Prancis menyatakan Tahiti dan Marquesa Kepulauan protektorat Perancis. Pada tahun 1880, Prancis menegosiasikan kesepakatan dengan anak Ratu dan pewaris, Pomare V, untuk membeli pulau-pulau, mengubah protektorat menjadi sebuah koloni yang diakui secara resmi. Pada tahun 1958, Prancis direklasifikasi koloni sebagai luar negeri wilayah.
 41. Polinesia Prancis mempertahankan Pemerintah teritorialnya sendiri, lengkap dengan presiden sendiri dan perakitan teritorial legislatif dengan perwakilan dari di seluruh pulau. Sebagai bagian dari Perancis, Polinesia Prancis memegang dua kursi di Majelis Nasional dan mengirimkan satu wakil ke Senat. Gerakan ini dengan ideal otonomi meskipun, Pemerintah Perancis, diwakili oleh komisaris tinggi di Tahiti, terus mempertahankan tanggung jawab atas isu-isu seperti penegakan hukum, properti dan kemasyarakatan rights.¹² Dalam pemilu terakhir, pro-kemerdekaan koalisi progresif yang dipimpin oleh Oscar Temaru, Union pour la democratie, membentuk pemerintah dengan mayoritas satu kursi di parlemen 57 kursi, mengalahkan partai konservatif, Tahoera'a Huiraatira, dipimpin oleh Gaston Flosse. Kemenangan itu memperkuat posisi untuk kemerdekaan.
 42. Pada tahun 1946, Polinesia Prancis telah dihapus oleh Pemerintah Perancis dari daftar Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri. Uni pour la democratie sekarang mengambil langkah-langkah untuk pemulihan pada daftar untuk dipertimbangkan oleh Pansus. Langkah ini mendapat dukungan yang akan kuat dari Konferensi Gereja Pasifik, Liga Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan, Gerakan Non-Blok, Grup ujung tombak Melanesia dan World Council of Churches.
 43. In seeking the right to self-determination and independence, the Union pour la démocratie requires the General Assembly to support reinstatement on the list of Non-Self-Governing Territories. There are compelling grounds for such reinstatement: French Polynesia had satisfied the criteria established in Assembly resolution 1541 (XV); it had initially featured on the list; and there is support in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, including in article 3, on the right to self-determination. The Asia-Pacific Forum, organized in Tahiti on 5 and 6 July 2012 y the territorial Government and the Club de Madrid, suggested that there was a need for more research into and future efforts for decolonization in Tahiti and the region.
 44. Kolonisasi Hawaii berwarna-warni dan kotak-kotak, meliputi Inggris, Eropa-Amerika dan Asia imigrasi, penggulingan monarki Hawaii dan masuk ke Amerika Serikat sebagai Wilayah Non-Pemerintahan Sendiri dan kemudian sebagai sebuah negara. Ini jalur kotak-kotak Meskipun demikian, upaya untuk Hawaii kemerdekaan berlanjut hari ini melalui berbagai kelompok. Apapun sifat Kelompok advokasi kemerdekaan, fokusnya adalah sama: pemerintahan sendiri dan penentuan nasib sendiri sebagai bangsa merdeka atau melalui hubungan yang mirip dengan kedaulatan suku di Amerika Serikat. Dalam pengakuan atas hubungan ekonomi yang erat dengan Amerika Serikat, ada juga kesepakatan bahwa pendekatan bertahap diadopsi.
 45. Hawaii, seperti Polinesia Prancis, awalnya tampil di daftar Non-Pemerintahan Sendiri Wilayah sampai itu dihapus secara sepihak pada saat kenegaraan di 1959. Diakui bahwa, pada tahun 1993, kemudian Presiden, William J. Clinton, meminta maaf atas nama Amerika Serikat untuk

¹¹ Makiko Kuwahara, *Tattoo: An Anthropology* (Oxford, Berg, 2005), p. 29.

peran Pemerintah dalam menggulingkan monarki Hawaii. Disarankan bahwa permintaan maaf ini harus menyediakan platform yang subur untuk kembali terlibat dialog antara Hawaii gerakan kemerdekaan dan pemerintah, berfokus pada kesamaan seperti self-governance dan penentuan nasib sendiri. Mengingat bahwa istilah-istilah ini dapat diwujudkan dalam berbagai kendaraan, kuncinya adalah untuk memulai dialog terbuka dan bermakna. Hawaii menawarkan pelajaran untuk PBB berkaitan dengan tanggung jawab terhadap Penduduk Asli. Standar Organisasi sendiri tidak dipenuhi ketika mengubah status dan kondisi masyarakat Hawaii. Pertanyaan yang timbul dalam kaitannya dengan moral dan kewajiban hukum bisa berharga dalam Dekade Internasional Ketiga Pemberantasan Kolonialisme.

WEST PAPUA

46. Penduduk Asli Papua Barat berjuang untuk memperoleh Kemerdekaan dan Hak Penentuan Nasib Sendiri. Kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah mereka akan meningkat oleh laporan kekerasan, seperti yang tercantum dalam laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review pada Juli 2012 (A/HRC/21/7).
47. Menurut Akihisa Matsuno, seorang profesor di Osaka Sekolah Kebijakan Publik Internasional yang mengkhususkan diri di Indonesia, apa yang terjadi di Papua Barat adalah genosida, baik fisik dan budaya. Ia mengatakan, paling Setidaknya, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hal penghancuran sistematis penduduk sipil yang disengaja, diperluas dan berkelanjutan.¹³
48. Ini ketidakadilan saat memberikan alasan tambahan untuk mendukung klaim kemerdekaan, klaim yang memiliki akar dalam kesalahan sejarah. Pertama kolonisasi adalah pada tahun 1828, ketika Belanda menguasai wilayah itu. Pada tahun 1944, itu disepakati bahwa Administrasi New Guinea Barat (Belanda Nugini) akan ditempatkan pada daftar Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri.
49. Pada bulan Januari tahun 1961, pemilihan Dewan New Guinea diadakan. Namun demikian, Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang West New Guinea (Irian Barat) telah ditandatangani pada Agustus 1962, untuk memperdagangkan West New Guinea ke Indonesia. Aplikasi ini ditunda tujuh tahun ke Komisi Khusus Dekolonisasi.
50. Ada alasan yang jelas untuk Majelis Umum untuk mendukung pemulihan pada daftar Wilayah Tak Berpemerintahan Sendiri. Pertama, Papua Barat telah puas dengan Kriteria yang ditetapkan dalam resolusi 1541 (XV). Kedua, hal itu telah menampilkan awalnya pada daftar. Ketiga, hak penentuan nasib sendiri yang diartikulasikan dalam pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli.
51. Mengingat pelanggaran hak asasi manusia, urgensi dianjurkan. Itu signifikansi pelanggaran HAM berat seperti kematian dan diskriminasi abadi membutuhkan tindakan. Penduduk Asli Papua Barat bahkan tidak bisa mengibarkan bendera mereka atau bertemu dalam jumlah besar tanpa pembalasan yang melanggar banyak hak asasi manusia yang diabadikan dalam Deklarasi. Deklarasi tersebut mungkin menawarkan jalan menuju rekonsiliasi di banyak contoh Ulasan sini.

¹³ Marni Cordell, "Does West Papua have a publicity problem?", 3 March 2011. Available from <http://newmatilda.com/2011/03/03/does-west-papua-have-publicity-problem>.

REKOMENDASI DAN KESIMPULAN

52. Hal ini tak terbantahkan bahwa kolonisasi telah merugikan negara pulau Pasifik, bahwa Penduduk Asli memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan bahwa dekolonisasi Pasifik bermasalah. Ketiga Dekade Internasional untuk Pemberantasan Kolonialisme terlepas, masih ada pulau-pulau Pasifik mencari kemerdekaan dari penjajah mereka.
53. Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, Hawaii dan Papua Barat semua mencari hak untuk menentukan nasib sendiri. Semua telah mengalami proses bermasalah dan banyak yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima yang lebih memperburuk proses ini. Masalah-masalah ini meskipun, ada proses untuk mencari dekolonisasi melalui Panitia Khusus. Mengingat proses penting dengan mana Komite bertugas, dianjurkan bahwa dana yang memadai untuk melanjutkannya.
54. Mengingat masalah yang terjadi, disarankan bahwa sebuah Agen PBB yang berhubungan harus mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan Tenaga Ahli untuk membahas Dekolonisasi Pasifik kerja sama dengan Komisi Khusus Dekolonisasi untuk menilai lamaran Kemerdekaan.